

ANALISIS REALISASI ASPIRASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Mursalin usman, Ahmad Junaiedi, Nelson

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

mursalinusman@gmail.com, ahmadjunaiedi59@gmail.com, nelson79@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara realisasi aspirasi masyarakat agar melalui Program Nasional Pemberdayaan Mandiri kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur tercapai dan untuk mengetahui pola dan pengaturan yang bagaimanakah agar kiranya Program Nasional Pemberdayaan Mandiri dapat berjalan demi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa realisasi aspirasi masyarakat pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jabung dalam bidang perbaikan sarana fisik kesehatan, responden yang menyatakan sangat aspiratif.

Kata kunci : aspirasi, kesejahteraan, masyarakat.

ABSTRACT

The aim of the study was to find out how to realize people's aspirations so that through the National Program for Self-Empowerment of Community welfare in Jabung Subdistrict, East Lampung Regency was reached and to find out the pattern and arrangement so that the Mandiri National Empowerment Program could run for the welfare of the people in Jabung District, East Lampung Regency. This study uses several methods of data collection including observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study that the realization of community aspirations in the implementation of the National Rural Empowerment Program (PNPM) Mandiri in Jabung Subdistrict in the field of improving physical health facilities, respondents who stated were very aspirational.

Keywords: aspirations, welfare, society.

PENDAHULUAN

Program Nasional Pember-dayaan Masyarakat (PNPM) dewasa ini telah dan sedang digalakkan oleh pemerintah. Peran Pemerintah seba-gai penyemangat atau pemberi stimu-lus setidaknya dapat menjawab permasalahan yang dirasakan dan dihadapi oleh masyarakat pada suatu komunitas tertentu.

Pemberdayaan atau menyer-takan masyarakat pada suatu kegiatan tertentu adalah wujud dan bentuk program yang dapat mengu-rangi dampak-dampak negatif dilingkungan masyarakat. Upaya

diadakannya pogram ini tidak lain adalah untuk menjemput bola agar permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat tidak mengandung resiko yang biasanya berkesan sulit dan lamanya suatu permasalahan disele-saikan oleh pemerintah. Sehingga program ini sebagai upaya merealisasikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Program Nasio-nal Pemberdayaan Masyarakat (2008:2) bahwa: Visi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) secara umum adalah menciptakan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat terutama yang masih

kekurangan (miskin) di perdesaan dengan jalan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, pengefektifan fungsi dan peran pemerintah setempat, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar ekonomi kerakyatan (masyarakat) dan pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Untuk lebih jelasnya visi misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dikarenakan bahwa Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulunginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Sehingga mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin,

efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Adapun berdasarkan ketentuan pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2010 yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, maka kriteria pemberian bantuan atas dasar kemiskinan yang dialami masyarakat adalah pemberian bantuan pada penduduk dibawah 40.000 Jiwa maka bantuan yang diberikan adalah berkisar Rp. 1.000.000.000,- hingga 2.500.000.000,- yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan kelangkaan hidup. Berdasarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (2010: 22).

Dengan demikian tujuan umum dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Sedangkan tujuan khusus dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini adalah :1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan, 2) Memebagikan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal, 3) Mengembangkan kapasitas

pe-merintah lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif. 4) Menye-diakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat, 5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir, 6) Men-dorong terbentuk dan berkembang-nya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKSAD) dalam pengelolaan pembangunan, 7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepen-tingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Dari tujuan khusus sebagaimana diuraikan di atas ternyata tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) didasari pada suatu prinsip antara lain : bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratisasi, transparansi dan akuntabel, prioritas dan keberlanjutan.

Adapun lokasi dan kelompok yang menjadi sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini adalah :1) Lokasi, dalam hal ini lokasi program adalah seluruh kecamatan yang termasuk dalam kategori kecamatan bermasalah dalam PPK dan Seluruh Kecamatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah dalam skema cost sharing miskin, 2) Kelompok sasaran, adalah para rumah tangga miskin (RTM) di perdesaaan dan kelembagaan masyarakat di perdesaaan serta kelembagaan pemerintah lokal.

Secara administratif, Keca-matan Jabung merupakan Bagian Wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan populasi penduduk yang heterogen. Sebagai lintasan daerah dengan prasarana transportasi yang baik telah menjadikan Kabupaten Lampung Timur menjadi perlintasan kendaraan dari dan menuju Pulau Jawa. Sehingga tidak mengherankan bila Kecamatan Jabung

dapat dijadikan tempat kediaman dari para mereka yang selanjutnya mengambil pertimbangan untuk menetap dan menjadi penduduk Jabung.

Akibat dengan pemekaran wilayah dari Kabupaten Induk yakni Kabupaten Lampung Tengah maka daerah ini adalah daerah yang harus berbenah dalam rangka mempercepat pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Di Kecamatan Jabung telah banyak berdiri permukiman-permukiman penduduk, baik yang diadakan oleh pengembang sebagai pemukim-an karyawan perusahaan (pabrik) maupun perumahan pribadi. Sehingga dewasa ini populasi penduduk di Kecamatan Jabung telah mendekati kepadatan namun dari kepadatan tersebut posisinya tidak merata dikarenakan masih sebagian besar wilayah Jabung adalah pertanian dan adapun perumahan adalah pada komunitas tertentu dan dilokasi tertentu yang umumnya dekat dengan usaha pertanian mereka sehingga dengan penataan yang kurang pada awal pengelolaan pemukiman dipastikan lokasi permukiman penduduk ini kurang baik dan masih kurangnya sarana dan prasarana, baik dalam bentuk jalan maupun persediaan air minum dan lain sebagainya.

Kepadatan penduduk dengan daya dukung tata ruang yang tidak seluruhnya tertata rapi sering menimbulkan permasalahan wilayah yang langsung terasa oleh masyarakat, seperti kondisi jalan dan gorong-gorong serta lainnya yang sudah tidak memadai. Hal ini biasanya berlangsung lama dan masyarakat mendambakan segera diadakan perbaikan oleh pemerintah. Namun yang sering terjadi adanya kelambatan didalam penyelesaiannya sehingga perasaan

masyarakat dalam daya tampung aspirasi sering terhambat.

Adapun ukuran atau indikator dari suatu tingkat kesejahteraan dapatlah diartikan bahwa sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat yang menuju pada suatu kemak-muran dimana kemudahan-kemudahan untuk diperolehnya suatu kebutuhan dapat dilakukan dengan mudah. Adapun indikator kesejah-teraan dalam hal ini menyangkut: kemudahan mendapatkan kebutuhan, tidak mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan memiliki rasa aman akan lingkungan.

Langkah yang dilakukan dalam upaya memperkenalkan dan menerapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah melalui beberapa tahapan dan langkah seperti :1) Melakukan pertemuan urun rembuk untuk membicarakan permasalahan lingkungan disekitar tempat tinggal, 2) Melaporkan hasil pertemuan kepada pamong setempat tentang hasil rembukan, 3) Melibatkan kaum ibu agar kiranya diambil sarannya pada pertemuan selanjutnya, 4) Melaporkan hasil pertemuan berikut kepada Pamong yang lebih tinggi seperti halnya kecamatan, 5) Menunggu hasil tanggapan dari pihak pemerintah setempat

Adapun masalah urun rem-bug yang dilakukan oleh masyarakat adalah membicarakan permasalahan yang merupakan keinginan masyarakat sebagaimana kebutuhan yang dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari dan juga sarana transpor-tasi yang mencirikan bentuk jalan sebagai penghubung dan untuk mengangkut hasil pertanian atau masih minimnya sarana kesehatan dan walaupun telah ada hanya sebatas Puskesmas namun untuk sarana rumah bersalin, pondok bersalin

dan poliklinik atau balai kesehatan belum ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah realisasi aspirasi masyarakat melalui program Pemberdayaan Masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara realisasi aspirasi masyarakat agar melalui Program Nasional Pemberdayaan Mandiri kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur tercapai dan untuk mengetahui pola dan pengaturan yang bagaimanakah agar kiranya Program Nasional Pemberdayaan Mandiri dapat berjalan demi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur

Menurut John Odhius, (2009 : 12), selaku Koordinator Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Lampung menyatakan bahwa sebagai prioritas terdapat tiga hal penting diadakannya PNPM Mandiri, yaitu penanggulangan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan, sangat relevan dengan kondisi kekinian yang dihadapi Provinsi Lampung. Adapun angka rumah tangga miskin (RTM) 11 kabupaten/kota seprovinsi Lampung yang dirilis akhir 2007 mencapai 835 ribu RTM, hal ini sudah seharusnya ada upaya menang-gulangnya dengan menggunakan pendekatan multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan dengan memadukan aspek-aspek penyadar-an, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Untuk hal ini perlu kiranya terdapat definisi tentang kemiskinan yang lebih luas sebagaimana hal ini disampaikan John Friedman (Ala, 1996: 4). Yang menyatakan bahwa kemiskinan sebagai

ketidaksamaan mengakumulasi basis kekuasaan sosial, yaitu kemampuan menguasai peluang strategis yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Sebab Akan tetapi, permasalahan kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak pembangunan merupakan masalah bersama seluruh elemen anak bangsa yang harus segera ditangani. Sebab itu, upaya tidak lagi mengandalkan sumber daya alam semata, tetapi melalui peningkatan peran manusia dalam pembangunan, menduduki fungsi vital strategis.

Kecamatan Jabung sebagai wilayah Kecamatan dengan 15 Desa yang tersebar, sangat memerlukan perhatian pemerintah dalam hal pola pengairan sawah yang selama ini hanya mengandalkan tadah hujan. Sebab dengan mayoritas petani, setidaknya masyarakat membutuhkan sarana pengairan yang dapat mengairi sawahnya untuk melakukan panen dua atau tiga kali setahun.

Disamping itu juga belum adanya sarana air bersih dan kerusakan jalan desa atau jalan tembus yang dapat membangkitkan ekonomi desa serta gorong-gorong masih nampak belum adanya perbaikan. Padahal apabila sarana air teknis persawahan, air bersih dan sarana transportasi antar dan inter desa dipenuhi tentu sangat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatannya sehari-hari.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah mereka kurang memahami tentang pelaksanaan dan menggolkan usulan dikarenakan faktor kurangnya pemahaman terhadap program tersebut. Dengan adanya program tersebut diharapkan masyarakat dapat mengusulkan

keinginannya dalam bentuk tampungan aspirasi yang dengan bantuan dan arahan pamong serta pendamping dapat meningkatkan kesejateraanannya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Jabung.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, (1990 : 567) menyebutkan bahwa Aspirasi merupakan hak setiap manusia yang ada dalam suatu kelompok atau pribadi. Aspirasi sebagaimana Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah : Suatu keinginan pribadi terhadap suatu hal dan cara perolehannya masih dalam sebatas khayalan atau keinginan belaka.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan dsb manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. Seperti; sekolah, keluarga, perkumpulan, Negara semua adalah masyarakat Dalam ilmu sosiologi kita mengenal ada dua macam masyarakat, yaitu masyarakat paguyuban dan masyarakat petambayan. Masyarakat paguyuban terdapat hubungan pribadi antara anggota- anggota yang menimbulkan suatu ikatan batin antara mereka. Kalau pada masyarakat patambayan terdapat hubungan pamrih antara anggota- anggotanya.

Berikut di bawah ini adalah beberapa pengertian masyarakat dari beberapa ahli sosiologi dunia :

Menurut Selo Sumardjan, (2003 : 12), masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Menurut Karl Marx, (1998 : 23), masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

Menurut Emile Durkheim, (2001 : 45), masyarakat merupakan suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.

Menurut Paul B. Horton & C. Hunt, (2003 : 23) : Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut. Masyarakat merupakan gabungan dari individu-individu, oleh karena itu setiap individu harus bisa menjadi masyarakat yang modern, dalam arti tanggap akan perubahan-perubahan zaman, untuk itu masyarakat harus bisa menguasai IPTEK yang semangkin hari semakin berkembang pesat.

Menurut Soerjono Soekanto, (1999 : 26) dalam masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut ini : beranggotakan minimal dua orang, anggotanya sadar sebagai satu kesatuan, berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat dan menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

Menurut Marion Levy, (1998 : 11), diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan / disebut sebagai masyarakat : saling setia pada sistem tindakan utama, mampu bertahan lebih dari masa hidup seorang anggota dan sebagian atau seluruh anggota baru didapat dari kelahiran atau reproduksi

Menurut Soerjono Soekanto, (1999 : 24) membagi terentuknya masyarakat menjadi 2 (dua) bagian : masyarakat paksaan, misalnya negara, masyarakat tawanan. Masyarakat merdeka :

- 1) Masyarakat natur,yaitu masyarakat yang terjadi dengan sendiri nya, seperti: geromboklan (harde), suku (stam), yang bertalian karena hubungan darah.
- 2) Masyarakat kultur,yaitu masyarakat yang terjadi karena kapantingn kedunian atau kepercayaan.

Marion Levy, (1998 ; 56), menyatakan masyarakat dipandang dari sudut Antropologi terdapat 2 (dua) type yaitu antara lain :

- 1) Masyarakat kecil yang belum begitu kompleks, belum mengenal pembagian kerja, belum mengenal tulisan, dan tehknologi nya sederhana.
- 2) Masyarakat sudah kompleks, yang sudah jauh menjalankan spesialisasi dalam segala barmasyarakat bidang, kerena pengetahuan modern sudah maju,tehknologi pun sudah berkembang,dan sudah mengena ltulisan.

Menurut Buku Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, (2007 : 14). PNPM adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

- 1) PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- 2) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Menurut Buku Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, (2007 : 14) tujuan PNPM adalah sebagai berikut :

- 1) Tujuan Umum, meningkatkannya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.
- 2) Tujuan Khusus, meningkatkannya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, meningkatkannya kapasitas

kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel, meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*), meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya, meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. dan meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan PNPM merupakan seperangkat kegiatan yang pelaku utamanya adalah masyarakat yang dimulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku – pelak lainna mulai dari desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya yang berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina agar tujuan, perinsip, kebijakan dan prosedur serta mekanisme PNPM MP tercapai secara benar dan konsisten.

Untuk merealisasikan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) yang dimulai dari desa, pelaksanaanya adalah dimulai dari Kepala Desa yang berfungsi sebagai

Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) yang dibantu oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap tahapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP), termasuk sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian di desa.

Sedangkan pelaksanaan PNPM MP di Kecamatan dengan peran seorang camat berfungsi atas nama Bupati adalah sebagai Pembina pelaksanaan PNPM MP kepada desa-desa yang dibantu oleh badan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) dalam penyelenggaraan operasional dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM MP di Kecamatan.

Setelah kegiatan di desa dan kemudian direstui oleh Kecamatan selaku Pembina, maka ada tugas lainnya sebagai pelaksanaan PNPM MP ini adalah suatu tim yang bertugas melakukan verifikasi dan melakukan pemeriksaan serta penilaian atas usulan kegiatan semua desa peserta PNPM MP dan membuat rekomendasi kepada masyarakat antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Kegiatan PNPM Mandiri merupakan program nasional yang meliputi beberapa langkah mulai dari perencanaan di Kecamatan atau Kabupaten dan pada akhirnya dilakukan MAD (Musyawarah Antar Desa). MAD merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi tentang tujuan, prinsip, prosedur maupun hal-hal yang berkaitan dengan PNPM MP (Mandiri Perdesaan) serta kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM MP.

Pelaksanaan MAD adalah suatu kegiatan sosialisasi yang mempertemukan masyarakat desa

sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM MP di desa dengan langkah yang dilakukan adalah melakukan pelatihan terhadap kader pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam rembug desa sebagai kegiatan penggalian gagasan meliputi beberapa kegiatan, antara lain :1) Musyawarah Desa khusus perempuan (MKP). Dimana kegiatan yang dihadiri oleh kaum perempuan adalah melakukan pembahasan berdasarkan gagasan-gagasan dari kelompok perempuan. Hasil dari pelaksanaan rembug kelompok perempuan ini dilaporkan pada musyawarah desa yang merupakan sebagai perencanaan yang kemudian disahkan sebagai bagan dari usulan desa, 2) Musyawarah Desa Perencanaan. Kegiatan ini merupakan pertemuan masyarakat desa yang bertujuan untuk membahas seluruh kegiatan yang digali dari penggalian gagasan pada tingkat kelompok desa.3) Penulisan Usulan Desa. Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan menguraikan secara tertulis terhadap gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada MAD dan proses ini dilakukan oleh TPU yang sebelumnya dipilih dalam forum musyawarah desa. 4) Verifikasi Usulan, Kegiatan ini merupakan suatu tahapan kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai kelayakan kegiatan dari setiap desa untuk didanai PNPM MP. Pelaksanaan Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yang beranggotakan 5-10 orang yang diketahui memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan.

Selo Sumardjan, (2003 : 224). Menyebutkan bahwa sejahtera adalah konotasi kemakmuran yang dapat diwujudkan dalam suatu kondisi, suatu keadaan dimana orang atau

masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya secara layak.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional melalui analisis kualitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari responden yakni masyarakat Jabung Kabupaten Lampung Timur yang mendapat bantuan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.

Dalam penelitian ini analisis yang penulis gunakan untuk menganalisa adalah analisis kualitatif yaitu memberikan penjabaran terhadap hasil jawaban dari responden dengan uraian kalimat tentang realisasi aspirasi masyarakat terhadap program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan jabung kabupaten lampung timur. Setelah dianalisis, selanjutnya diambil suatu kesimpulan untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penghargaan perspektif partisipatif dalam program pembangunan desa yang dioperasikan berdasarkan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Konsistensi sikap para pelaku pembangunan terhadap perspektif partisipatif mensyaratkan adanya komitmen serta pengetahuan tentang penghargaan terhadap pengalaman masyarakat. Demikian pula, di tengah dinamika perjalanan suatu program pembangunan dengan cakupan wilayah yang luas seperti halnya PNPMM Mandiri Perdesaan (PNPM MP) pun tetap

menuntut ketersediaan perangkat sistem, prosedur dan pelaku yang memadai berdasarkan penghormatan pada pengalaman masyarakat ini.

Realisasi aspirasi masyarakat pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jabung dalam bidang pembuatan irigasi non teknis, jalan utama kabupaten dan jalan desa, responden yang terdiri dari masyarakat penerima dan responden selaku pengelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jabung ini yang menyatakan sangat aspiratif. Hal ini dikarenakan mereka selaku penerima program merasa antusias dan berbahagia karena diwilayahnya menerima bantuan dan menurut mereka penerima program beranggapan bahwa sekalipun seadanya mereka tetap menerima dan adapun terhadap program pembuatan saluran irigasi teknis mereka pada umumnya tidak mendesak untuk dibangunnya sarana irigasi teknis tersebut sebab mereka masih ada anggapan bahwa program akan bisa dilanjutkan pada usulan tahun mendatang.

Sedangkan yang tidak merasa terbantu dinyatakan tidak ada. Berarti program ini langsung menyentuh masyarakat dan semua merasa terbantuan sesuai dengan klasifikasinya. Terselenggaranya pemberian bantuan ini dikarenakan pada saat penyeleksian bantuan dilakukan dengan cermat dimana berdasarkan hasil Musyawarah Desa dilakukan penganalisaan akar permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan.

Program ini terlaksana dengan baik dikarenakan pengelola program berikut dengan petugas-petugas yang membidangi program ini sebelumnya melakukan penganalisaan yang mendalam dengan maksud agar

kegiatan ini langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Jabung. Sehingga dengan penerapan program masyarakat merasa sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PNPM sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur adalah :a) Faktor pencapaian dapat bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Penetapan Faktor pencapaian akan merujuk pada sasaran sosialisasi PNPM beserta fokus dari masing-masing strategi PNPM,b) Sama terhadap PNPM sebagai kebijakan nasional yang menjadi 'payung' bagi semua program upaya peningkatan kesejahteraan berbasis Fokus Pencitraan: terdapat pemahaman dan pengakuan dan dukungan yang pemberdayaan masyarakat. c) Aktivasi: mencakup aspek kognitif (tingkat pengetahuan), aspek afeksi (ketertarikan dan kepedulian) dan konatif (tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan, komitmen tindakan melaksanakan PNPM).

Monitoring dan evaluasi bertujuan agar setiap penanggungjawab dan pengambil keputusan dapat mengetahui keberhasilan maupun permasalahan yang dihadapi sedini mungkin untuk dapat ditangani secara tepat waktu. Monitoring meliputi aspek proses pelaksanaan komunikasi dan pengaruh yang terbentuk melalui beberapa proses sosialisasi, ialah memonitor dan mengevaluasi apakah aktivitas komunikasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan strategi dan program yang telah disusun.

Pengaruh komunikasi dimonitor untuk menjawab capaian indikator keberhasilan sosialisasi, sebagai berikut: meningkatnya pemahaman masyarakat luas, diperolehnya dukungan yang kuat

dari berbagai pihak, meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap PNPM, meningkatnya komunikasi dan koordinasi kerjasama antar instansi/sector dan terbangunnya kemitraan dengan berbagai pihak.

Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Unit yang melakukan monitoring terhadap proses dan keberhasilan komunikasi dilakukan oleh institusi penyelenggara komunikasi dan sosialisasi dengan bekerjasama dengan lembaga independen. Peranan unit pengaduan masyarakat, disamping menampung pengaduan yang berkaitan dengan substansi program PNPM, juga menampung dan menyalurkan respon terhadap kegiatan komunikasi dan sosialisasi. Melalui koordinasi kerja yang baik, informasi yang diterima UPMPNPM Mandiri dapat diteruskan ke Tim Koordinasi kabupaten dan pimpinan daerah untuk ditindaklanjuti penanganannya dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Informasi tersebut juga disampaikan kepada pelaksana sosialisasi untuk perbaikan program sosialisasi apabila diperlukan.

Mekanisme Pengelolaan Umpan balik menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan PNPM. Hal ini membutuhkan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu umpan balik dari seluruh pihak yang terlibat mutlak diperlukan. Mekanisme penyampaian umpan balik dapat dilakukan dengan membuka kotak pos, melakukan wawancara dengan penerima manfaat, atau mengaktifkan bagian komunikasi pelaksana PNPM untuk menerima masukan baik disampaikan secara langsung ataupun melalui media umum seperti surat, SMS, atau lewat telepon. Termasuk di sini dengan mengevaluasi laporan media massa, dalam berita dan bentuk produk media lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Realisasi Aspirasi Masyarakat Terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM): Realisasi aspirasi masyarakat pada pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kecamatan Jabung dalam bidang perbaikan sarana fisik kesehatan, pembuatan jalan, bantuan langsung tunai belum selesai dilaksanakan pada umumnya dikarenakan penerapannya (implementasi) berkaitan dengan urusan dan tertundanya pada respon pemerintah pusat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, yang pertama yaitu faktor pencapaian dapat bersifat kualitatif. Penetapan faktor pencapaian akan merujuk pada sasaran sosialisasi PNPM beserta fokus dari masing-masing strategi PNPM Sama terhadap PNPM sebagai kebijakan nasional yang menjadi 'payung' bagi semua program upaya peningkatan kesejahteraan berbasis Fokus Pencitraan: terdapat pemahaman dan pengakuan dan dukungan yang pemberdayaan masyarakat. Aktivasi: mencakup aspek kognitif (tingkat pengetahuan), aspek afeksi (ketertarikan dan kepedulian) dan konatif (tingkat partisipasi dalam pengambilan keputusan, komitmen tindakan melaksanakan PNPM).

Yang kedua adalah faktor Monitoring Dan Evaluasi, Monitoring dan evaluasi bertujuan agar setiap penanggungjawab dan pengambil keputusan dapat mengetahui keberhasilan maupun permasalahan

yang dihadapi sedini mungkin untuk dapat ditangani secara tepat waktu. Monitoring meliputi aspek proses pelaksanaan komunikasi dan pengaruh yang terbentuk sebagai berikut : Proses sosialisasi, ialah memonitor dan mengevaluasi apakah aktivitas komunikasi yang dilak sanakan telah sesuai dengan strategi dan program yang telah disusun. Pengaruh komunikasi dimonitor untuk menjawab capaian indikator keberhasilan sosialisasi, sebagai berikut : Meningkatnya pemahaman masyarakat luas, Diperolehnya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap PNPM, Meningkatnya komunikasi dan koordinasi kerjasama antar instansi/sector dan terbangunnya kemitraan dengan berbagai pihak.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran yaitu dalam hal meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peles-tarian pembangunan, hendaknya pro-gram ini mengedepankan kelembaga-an pengelolaan pembangunan parti-sipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal selain itu juga tujuan Program Nasional Pember-dayaan Masyarakat (PNPM) didasari pada suatu prinsip antara lain: Bertumpu pada pembangunan manu-sia, Otonomi dan Desentralisasi, Berorientasi pada masyarakat miskin, Partisipasi masyarakat dan Keseta-raan dan keadilan gender, Demo-kritisasi, Transfaransi dan akuntabel, Prioritas dan keberlanjutan. Selan-jutnya, hendaknya dikembangkan kapasitas pemerintah lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pemba-ngunan partisipatif dengan melalui penyediaan prasarana

sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat serta melembagakan pengelolaan dana bergulir, mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa (BKSAD) dalam pengelolaan pembangunan serta mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Emile Durkheim, 2001. *Masyarakat Modern*. Grasindo Jakarta.
- Karl Marx, 1998. *Masyarakat Dalam Struktur Organisasi*. Gramedia, Jakarta.
- Marion Levy, 1998. *Kriteria Masyarakat Yang Baik*, Grasindo, Jakarta.
- Paul B. Horton & C. Hunt, 2003. *Partisipasi Masyarakat*. Mandar Maju, Bandung.
- Purwararminta, 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Selo Sumardjan, 2003. *Masyarakat Serta Perkembangannya*. Rhineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1999. *Unsur-Unsur Masyarakat*, Rhineka Cipta, Jakarta.
- Sofyan Efendi, 1997, *Survey Sosiologi Metode*, Bina Aksara, Jakarta
- Sugiyono, 1997. *Metodologi Penelitian*. Alfabeta, Jakarta.
- Sujana, 1996. *Survai Sosial*, Gramedia Indonesia
- Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 2005.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Buku Panduan Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Tahun 2007, oleh Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat